



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2/04/DPRD/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEMBALI
ALAT-ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/02/DPRD/2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/20/DPRD/2016, tanggal 14 November 2016;
- b. bahwa fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah mengajukan perubahan terhadap komposisi keanggotaan dalam Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.931-Pem.Um/2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1277-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.154-Pem.Um/2016 tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 5 Januari 2017.
 2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 1 Maret 2017.
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 002/Fraksi PD/Cjr/II/2017, tanggal 28 Februari 2017, perihal Usulan Perubahan Nama-nama Alat-alat Kelengkapan DPRD.
 4. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 001/FGOLKAR/CJR/II/2017, tanggal 28 Februari 2017, perihal Usulan Nama untuk Perubahan Alat-alat Kelengkapan DPRD.
 5. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cianjur, Nomor 065/IN/DPC-05.12/II/2017, tanggal 28 Februari 2017, perihal Penugasan.
 6. Usulan dari Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 004/F.GPN/III/2017, tanggal 28 Februari 2017, perihal usulan personalia alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur.
 7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 07/ADM/FPKS/II/2017, tanggal 28 Februari 2017, perihal Usulan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) Fraksi PKS.
 8. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor /F.PKB/2017, tanggal 28 Februari 2017, perihal Pengajuan nama untuk Perubahan Alat-alat Kelengkapan DPRD.
 9. Surat dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 002/FRAKSI HANURA/CJR/II/2017, tanggal 27 Februari 2017, perihal Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/02/DPRD/2016 tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Maret 2016.

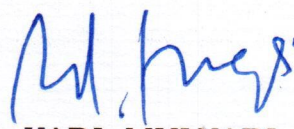
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/08/DPRD/2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/02/DPRD/2016 tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 18 April 2016.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/14/DPRD/2016 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/02/DPRD/2016 tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 18 Agustus 2016.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/20/DPRD/2016 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/02/DPRD/2016 tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 14 November 2016.

KEDUA : Membentuk Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Maret 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
 PEMBENTUKAN KEMBALI ALAT-ALAT
 KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 172.2/04/DPRD/2017
 TANGGAL : 1 Maret 2017

NO.	ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
I	PIMPINAN DPRD	1. YADI MULYADI, SH., MH.	Ketua
		2. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	Wakil Ketua
		3. SUSILAWATI, SH.	Wakil Ketua
		4. ANDRI SURYADINATA, SE.	Wakil Ketua
II	BADAN MUSYAWARAH DPRD	1. YADI MULYADI, SH., MH.	Ketua Merangkap Anggota
		2. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. SUSILAWATI, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		4. ANDRI SURYADINATA, SE.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		5. SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
		6. ENDI CAHYADI	Anggota
		7. H. USEP SETIAWAN, SH., MH.	Anggota
		8. HJ. ZULFA INDRAWATI, SH., MH., Kes.	Anggota
		9. MUHAMMAD TOHA, S.Ag., MPd,	Anggota
		10. Drs. H. SAPTURO	Anggota
		11. MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Anggota
		12. ASEP IWAN GUSNIARDI	Anggota
		13. CECEP BULDAN	Anggota
		14. DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	Anggota
		15. GERRI ARDIWIMARTA, ST.	Anggota
		16. SAHLI SAIDI	Anggota
		17. ASEP SOPYAN	Anggota
		18. Drs. H. GUGUN GUNAWAN	Anggota
		19. H. TEGUH AGUNG NM, S.Si.	Anggota
		20. H. WILMAN SINGAWINATA	Anggota
		21. LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	Anggota
		22. DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	Anggota
		23. ADE SOBARI	Anggota
		24. SUKANDAR SUDIRHAP	Anggota

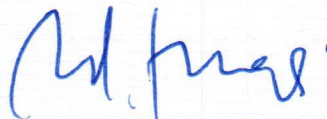
NO.	ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
III	BADAN ANGGARAN DPRD	1. YADI MULYADI, SH., MH.	Ketua Merangkap Anggota
		2. DEDEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. SUSILAWATI, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		4. ANDRI SURYADINATA, SE.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		5. SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
		6. ENDI CAHYADI	Anggota
		7. H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	Anggota
		8. MUHAMMAD RIKSA IP, SE.	Anggota
		9. MUHAMMAD TOHA, S.Ag., MPd.	Anggota
		10. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	Anggota
		11. MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Anggota
		12. Drs. H. SAPTURO	Anggota
		13. CECEP BULDAN	Anggota
		14. DADANG SUTARMO, SH.	Anggota
		15. INDRA YULIANA MULYA, SE.	Anggota
		16. SAHLI SAIDI	Anggota
		17. TAVIP DARMAWAN	Anggota
		18. Drs. H. ACENG ROMDON	Anggota
		19. drh. BARUNA F. W.	Anggota
		20. Hj. ISTINGANAH, SH.	Anggota
		21. LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	Anggota
		22. H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	Anggota
		23. ADE SOBARI	Anggota
		24. ENCE DENI NURYADI	Anggota
IV	KOMISI-KOMISI DPRD : 1. KOMISI I	1. H. WILMAN SINGAWINATA	Ketua Merangkap Anggota
		2. MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	Sekretaris Merangkap Anggota
		4. MUHAMMAD RIKSA, IP., SE.	Anggota

NO.	ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
		5. DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	Anggota
		6. RESMA YUNIA	Anggota
		7. drh. BARUNA F. W.	Anggota
		8. DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	Anggota
		9. SUKANDAR SUDIRHAP	Anggota
	2. KOMISI II	1. Drs. H. GUGUN GUNAWAN	Ketua Merangkap Anggota
		2. TIKA LATIFAH, S.Sos.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. YEDI RISWANDI, S.IP.	Sekretaris Merangkap Anggota
		4. HJ. LIKA NURHAYATI, S.IP.	Anggota
		5. H. ENDANG RENTEK	Anggota
		6. MUHAMMAD TOHA, S.Ag.	Anggota
		7. ASEP IWAN GUSNIARDI	Anggota
		8. H. DANI HAMDANI, SE.	Anggota
		9. H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	Anggota
	3. KOMISI III	1. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	Ketua Merangkap Anggota
		2. SAHLI SAIDI	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. ADE SOBARI	Sekretaris Merangkap Anggota
		4. ENDI CAHYADI	Anggota
		5. H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP	Anggota
		6. H. USEP SETIAWAN, SH., MH.	Anggota
		7. HJ. ITA YUDHA JAYA SARI	Anggota
		8. YOGI PRAYOGA, ST.	Anggota
		9. H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	Anggota
		10. DEDIH SUGIANTO	Anggota
		11. YUSUP EPENDI	Anggota
		12. GERRI ARDIWIMARTA, ST.	Anggota
		13. Drs. H. ACENG ROMDON	Anggota
		14. H. TEGUH AGUNG NM, S.Si.	Anggota
		15. DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	Anggota

NO.	ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
VI	BADAN KEHORMATAN DPRD	1. CECEP BULDAN	Ketua Merangkap Anggota
		2. DEDIH SUGIANTO	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. H. ENDANG RENTEK	Anggota
		4. Drs. H. GUGUN GUNAWAN	Anggota
		5. H. DANI HAMDANI, SE.	Anggota

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Maret 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI